Kinesik, 13(2), 2026, pp. 128 – 137, 2838

KINESIK
eISSN 2302-2035 | pISSN 3047-9614
Journal homepage https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/kinesik/index

Dynamics of Multi-Stakeholder Environmental Communication in Mitigating the Risk of Environmental Damage Due to Non-Metallic Mineral and Rock Mining in Buluri Village Ulujadi District Palu City

Dinamika Komunikasi Lingkungan Multistakeholder dalam Mitigasi Risiko Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota

Muh. Izra Akbar Nurrahman[1*], Ilyas Lampe[1], Muhammad Wahid[1], Anita Pahlevi[1]
[1]Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia

Keywords
Environmental communications;
Stakeholders;
Mining;
Environmental policy

ABSTRACT
This study aims to analyze the forms of environmental communication that occur between the community, government, academics, and non governmental organizations, and to identify the roles of stakeholders in efforts to reduce the risk of environmental damage from mining activities. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Research informants include affected communities, local governments, and environmental organizations. Data were collected through field observations, in-depth interviews, and documentation. The research findings indicate that environmental communication in Buluri Village takes place through policy socialization, community outreach, and environmental advocacy by NGOs. This communication functions pragmatically in disseminating information and constitutively in fostering critical public awareness of the impacts of mining. However, communication effectiveness is hampered by weak inter-agency coordination, limited access to information, and lack of firm enforcement of environmental regulations.

Kata Kunci
Komunikasi lingkungan;
Stakeholders;
Pertambangan;
Kebijakan lingkungan

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk komunikasi lingkungan yang berlangsung antara masyarakat, pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat, serta mengidentifikasi peran stakeholder dalam upaya mengurangi risiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Informan penelitian meliputi masyarakat terdampak, pemerintah daerah, dan organisasi lingkungan. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan di Kelurahan Buluri berlangsung melalui sosialisasi kebijakan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta advokasi lingkungan oleh LSM. Komunikasi tersebut berfungsi secara pragmatis dalam penyebaran informasi dan secara konstitutif dalam membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap dampak pertambangan. Namun, efektivitas komunikasi masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan akses informasi, dan kurang tegasnya penegakan regulasi lingkungan.

[*]Corresponding author
Muh. Izra Akbar Nurrahman. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako, Indonesia
Email: isroakbar10@gmail.com

https://doi.org/10.22487/ejk.v13i2.2838
Received 22 April 2026; Received in revised form 15 August 2026; Accepted 16 August 2026
Published 20 August 2026; Available online 20 August 2026
2302-2035 | 3047-9614 / © 2026 The Authors. Managed by the Department of Communication Studies, Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University. Published by Tadulako University.
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

1. Pendahuluan

Fuady berpendapat Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan diluar KUHD. Tetapi terminologi perusahhan itu sendiri tidak dijelaskan pengertia ya secara resmi. Para ahli ekonomi secara umum memberikan pengertian bahwa perusahaan adalah sebuah unit kegiatan yang beraktivitas dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan serta melakukan upaya-upaya lain demi memperoleh keberuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat Mardikanto (2010).

Manusia merupakan mahluk ekonomi (homo economicus) selalu memerlukan pekerjaan sebagai sumber mata pencaharian yang bisa memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat sebagai lingkungan sosialnya. Terkai dengan pekerjaan yang dibutuhkan setiap individu tersebut, pada dasarnya mampu untuk diusahakan sendiri oleh setiap orang, baik bekerja sendiri maupun bersama orang lain (*entrepreneur*). Namun dalam praktiknya, untuk merintis usaha sebagai wirausaha, tidak setiap individu memiliki kemampuan dan keberanian. Dalam kondisi seperti itu, kehadiran perusahaan sangat diperlukan bagi setiap orang yang memerlukan pekerjaan (Mardikanto, 2010).

Perusahaan mempunyai andil yang besar dalam menciptakan stabilitas perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dalam peran perusahaan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Hadirnya perusahaan di tengah-tengah masyrakat memberikan kontribusi yang jelas dalam menjawab permasalahan nasional yaitu pengangguran. Perusahaan menggerakkan masyarakat disekitar perusahaan untuk melakukan aktivitas produksi Secara langsung peran perusahaan berkaitan erat dalam menciptakan stabilitas perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia (Mardikanto, 2010:10).

Di sisi lain, praktik pertambangan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah memicu berbagai permasalahan ekologis. Dampak negatif yang ditimbulkan meliputi kekeringan, tanah longsor, banjir bandang, serta degradasi ekosistem aliran sungai. Selain itu, infrastruktur publik, seperti jalan dan fasilitas umum lai ya, mengalami kerusakan signifikan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali. Kondisi ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 1 ayat (1), yang mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang yang terdiri atas benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup termasuk manusia beserta perilakunya—yang secara langsung memengaruhi keseimbangan ekosistem, kelangsungan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya (UUD 32 tahun 2009 pengelolaan lingkungan hidup).

Setelah Industri pertambang di Indonesia sangat pesat dan terus menjadi andalan bagi perekonomian nasional maupun daerah. Pertambangan mempengaruhi pendapatan dengan meningkatkan penghasilan bruto, meningkatkan penghasilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Pertambangan adalah sumber pendapatan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain aktivitas pertambangan ini dapat menjadi masalah jika pemanfaatan sumberdaya alam yang di ekstraksi tidak diatur sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan. (Iftitah, 2023).

Pertambangan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi di banyak negara. Negara-negara berkembang kini menjadi pemain utama dalam produksi dan

ketersediaan komoditas utama seperti tembaga (70%), bauksit (40%), bijih besi, dan logam mulia. Pertambangan juga berdampak positif pada perekonomian banyak negara. Dampak lain dari pertambangan dapat diukur dari segi kesempatan kerja dan perolehan pendapatan. Pertambangan skala komersial menyediakan lapangan kerja dan alih keterampilan bagi lebih dari 2 juta pekerja (Walser, 2002).

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, menjadikannya salah satu wilayah strategis dalam sektor industri di Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Sulteng menjadi pusat aktivitas industri yang berperan penting dalam perekonomian daerah maupun nasional. Salah satu sektor unggulan di provinsi ini adalah industri batu bara dan pengilangan minyak bumi, yang dikelola oleh lima perusahaan besar. Keberadaan industri ini tidak hanya berkontribusi terhadap penyediaan energi dalam negeri tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung lainnya. Selain itu, Sulawesi Tengah juga menjadi lokasi bagi sebelas perusahaan yang bergerak di bidang industri barang galian bukan logam. Sektor industri ini berfokus pada pengolahan berbagai sumber daya alam, seperti tanah liat, pasir kuarsa, batu kapur, serta bahan galian lainnya, yang memiliki peran signifikan dalam mendukung kebutuhan konstruksi dan manufaktur. Keberadaan industri tersebut semakin memperkokoh posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pengolahan sumber daya alam di Indonesia, sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis industri ekstraktif (Provinsi Sulawesi Tengah, 2023).

Diantara banyaknya isu kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan di Sulawesi Tengah, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, tengah menghadapi permasalahan lingkungan yang serius akibat aktivitas tambang mineral bukan logam dan batuan yang beroperasi di wilayah tersebut. Kegiatan pertambangan ini telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat.

Diantara banyaknya isu kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan di Sulawesi Tengah, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, tengah menghadapi permasalahan lingkungan yang serius akibat aktivitas tambang mineral bukan logam dan batuan yang beroperasi di wilayah tersebut. Kegiatan pertambangan ini telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat. Salah satu permasalahan utama yang timbul adalah kerusakan pada sumber mata air alami yang selama ini menjadi kebutuhan utama warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Tim Advokasi dan Kampanye WALHI, aktivitas tambang telah menyebabkan beberapa titik mata air mengering, sementara debit air yang tersisa semakin menurun. Salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut, PT. Mineral Sumber Artha, mengelola lahan seluas 35,23 hektar yang berkontribusi terhadap berkurangnya sumber mata air di Kelurahan Buluri (David, 2025).

Selain dampak terhadap lingkungan, aktivitas pertambangan juga menimbulkan permasalahan kesehatan bagi masyarakat. Debu yang dihasilkan dari kegiatan tambang menyebar hingga ke permukiman warga, terutama saat terjadi angin kencang. Hal ini memungkinkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas setempat, sebanyak 2.422 warga dilaporkan mengalami ISPA akibat paparan debu dari aktivitas tambang batuan (David, 2025).

Dalam konteks masalah lingkungan yang dihadapi di Kota Palu, komunikasi lingkungan dapat dilihat sebagai elemen krusial dalam pembuatan dan implementasi

kebijakan. Menurut Oepen (1999), komunikasi lingkungan melibatkan rencana dan strategi yang menggunakan proses komunikasi dan produk media untuk mendukung efektivitas pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan implementasinya pada lingkungan.

Komunikasi lingkungan bukan hanya sekadar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan komponen integral dalam proses pembuatan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan demikian, penerapan teori komunikasi lingkungan sangat relevan dalam konteks penanganan masalah lingkungan di Buluri, di mana partisipasi publik dan kolaborasi antara masyarakat, LSM, dan pemerintah menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan, terutama di daerah rawan bencana seperti Palu (Jatam, 2024).

Situasi krisis yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup menjadi hal yang sangat krusial bagi setiap pemangku kepentingan. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat memberikan solusi melalui pendekatan kolektif yang melibatkan berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, untuk meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi. Krisis ini merupakan tantangan yang harus dihadapi demi keberlangsungan sumber daya manusia dan alam di Sulawesi Tengah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang menghadapkan kepada pemaparan luas (thick description) tentang realitas (Bajari, 2015) terkait dengan penelitian komunikasi lingkungan dalam rangka mengurangi resiko kerusakan lingkungan akibat pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kelurahan Buluri. Deskripsi kualitatif yang dimana penelitian ini, data yang dikumpulkan beberapa kata-kata, gambar, dan tidak menggunakan perhitungan, analisis data statistik, selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap objek yang di teliti. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan, dokumen dan sebagainya tersebut dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap realitas (Sudarto, 2002:66).

Studi kasus adalah metode riset yang menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis. Menelaah berbagai sumber data ini membutuhkan berbagai macam instrumen pengumpulan data. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, organisasi atau komunitas, suatu program atau situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti (Mulyana, 2010).

3. Hasil Penelitian

Kelurahan Buluri merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi kelurahan ini dapat ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 5–10 menit dari pusat Kota Palu menuju arah Kabupaten Donggala. Secara geografis, Kelurahan Buluri berbatasan langsung dengan Kelurahan

Tipo di sebelah selatan dan Kelurahan Watusampu di sebelah utara. Secara etimologis, nama Buluri berasal dari bahasa Kaili Ledo, di mana kata bulu berarti “gunung” dan ri berarti “di”. Sebelum berganti nama, wilayah ini dikenal dengan sebutan Buuri yang berarti “lereng gunung”, merujuk pada lokasi awal permukiman masyarakat Buluri yang berada di lereng gunung. Daerah tersebut dihuni oleh masyarakat pertama yang bermigrasi dari kawasan pegunungan Loli, khususnya dari Lore Bau, Ngolo, dan Ulu Jadi. Kelurahan Buluri merupakan salah satu wilayah administratif di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi kelurahan ini dapat ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 5–10 menit dari pusat Kota Palu menuju arah Kabupaten Donggala. Secara geografis, Kelurahan Buluri berbatasan langsung dengan Kelurahan Tipo di sebelah selatan dan Kelurahan Watusampu di sebelah utara. Secara etimologis, nama Buluri berasal dari bahasa Kaili Ledo, di mana kata bulu berarti “gunung” dan ri berarti “di”. Sebelum berganti nama, wilayah ini dikenal dengan sebutan Buuri yang berarti “lereng gunung”, merujuk pada lokasi awal permukiman masyarakat Buluri yang berada di lereng gunung. Daerah tersebut dihuni oleh masyarakat pertama yang bermigrasi dari kawasan pegunungan Loli, khususnya dari Lore Bau, Ngolo, dan Ulu Jadi.

Pemilihan sembilan stakeholder sebagai informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung, pengetahuan, serta pengalaman terkait dinamika komunikasi lingkungan dalam mitigasi risiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kelurahan Buluri. Kesembilan stakeholder tersebut mewakili beberapa unsur penting, yaitu pemerintah, perusahaan tambang, masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam proses komunikasi, baik dalam bentuk penyampaian informasi, koordinasi, maupun penyampaian aspirasi terkait dampak pertambangan. Sementara itu, stakeholder lain tidak dijadikan sebagai informan karena tidak memiliki keterlibatan langsung dalam dinamika komunikasi lingkungan di lokasi penelitian atau berada di luar fokus penelitian yang dikaji.

Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui proses penelitian kualitatif deskriptif mengenai praktik komunikasi lingkungan dalam konteks aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Bagian ini merupakan inti dari keseluruhan penelitian karena di dalamnya terkandung temuan empiris yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, serta penelusuran data sekunder yang relevan. Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk memahami bagaimana proses komunikasi lingkungan dijalankan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam menghadapi dan mengelola risiko kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, sekaligus untuk menggambarkan berbagai isu dan dampak lingkungan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Meskipun sebagian besar wacana publik tentang aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kelurahan Buluri identik dengan isu degradasi lingkungan, penelitian ini menemukan bahwa di balik dinamika tersebut terdapat sejumlah dampak positif yang dirasakan masyarakat setempat. Secara umum, dampak positif ini muncul dalam bentuk perbaikan ekonomi rumah tangga, peningkatan infrastruktur wilayah, serta keterlibatan sosial perusahaan dalam kegiatan kemasyarakatan. Meskipun kontribusi ini belum merata dan masih menyisakan persoalan ketimpangan, namun temuan ini menunjukkan bahwa pertambangan juga membawa dimensi produktif yang diakui oleh sebagian besar informan.

Aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Aktivitas ini menjadi salah satu fenomena sosial-ekologis paling menonjol di kawasan barat Kota Palu, khususnya di sepanjang jalur Trans Palu–Donggala yang kini dikenal sebagai zona padat aktivitas mineral bukan logam dan batuan. Hampir seluruh informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di Buluri menghadirkan dua sisi paradoks, di satu sisi membuka peluang ekonomi bagi sebagian masyarakat dan mendorong pembangunan infrastruktur daerah, namun di sisi lain menimbulkan degradasi lingkungan, pencemaran udara, kerusakan sumber air, dan ketegangan sosial di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, komunikasi lingkungan di Kelurahan Buluri melibatkan sejumlah aktor yang memiliki peran dan pengaruh berbeda. Dari data penelitian, para pemangku kepentingan utama terdiri atas pemerintah daerah, perusahaan tambang, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, serta masyarakat lingkar tambang. Hubungan antaraktor ini dapat digambarkan melalui peta hubungan *stakeholders* sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta hubungan *stakeholders*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus komunikasi lingkungan di Buluri cenderung bersifat vertikal. Pemerintah dan perusahaan tambang menjadi pusat pengendali informasi lingkungan, sedangkan masyarakat berperan sebagai penerima informasi. LSM dan akademisi berfungsi sebagai pihak penghubung yang berusaha menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak berwenang.

4. Pembahasan

Komunikasi lingkungan yang berlangsung di Kelurahan Buluri memperlihatkan dinamika interaksi yang kompleks antar berbagai pemangku kepentingan, yang masing-masing memiliki kepentingan, bahasa, dan legitimasi sosial berbeda dalam memaknai aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan hasil wawancara lapangan dan analisis teoritik, setidaknya terdapat empat kelompok utama pemangku kepentingan yang berperan aktif: (1) pemerintah daerah, (2) perusahaan tambang, (3) lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi, serta (4) masyarakat lingkar tambang. Berdasarkan hasil penelitian, setiap kelompok yang terlibat dalam isu lingkungan di Kelurahan Buluri memiliki cara dan tujuan komunikasi yang berbeda. Pemerintah dan perusahaan tambang cenderung menggunakan bahasa teknis dan formal

dalam menyampaikan informasi, sedangkan masyarakat dan organisasi lingkungan lebih menekankan pada pengalaman langsung terhadap dampak aktivitas tambang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, komunikasi lingkungan di Kelurahan Buluri masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, administratif, dan sosial. Hambatan-hambatan tersebut muncul dalam bentuk keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi tambang, dominasi perusahaan dan pemerintah dalam menentukan arah komunikasi, serta minimnya forum publik yang memungkinkan warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Secara umum, hambatan komunikasi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek utama: (1) ketertutupan informasi lingkungan dan dokumen AMDAL, (2) dominasi bahasa teknis dan prosedur birokrasi, (3) ketiadaan mekanisme dialog publik yang sejajar, dan (4) menurunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses komunikasi lingkungan.

Pengelolaan lingkungan di Kelurahan Buluri tidak hanya bergantung pada aktivitas pertambangan yang berlangsung di lapangan, tetapi juga sangat ditentukan oleh keberlakuan kebijakan dan regulasi yang mengatur perizinan, pengawasan, serta mekanisme penegakan hukum lingkungan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa secara normatif, perangkat hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebenarnya telah tersedia, antara lain melalui kewajiban penyusunan dokumen AMDAL, sistem pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta ketentuan reklamasi pascatambang bagi perusahaan.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal masih menghadapi sejumlah kendala. Berbagai persoalan muncul, mulai dari lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan efektivitas pengawasan di lapangan, hingga minimnya akses masyarakat terhadap informasi publik terkait perizinan dan dampak lingkungan. Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa dinamika pelaksanaan kebijakan lingkungan di Buluri dapat dijelaskan melalui empat aspek utama berikut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun aktivitas pertambangan MBLB di Kelurahan Buluri telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal, namun persoalan lingkungan, sosial, dan tata kelola masih menjadi isu dominan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Harapan dan rekomendasi yang muncul dari hasil wawancara dengan masyarakat, pihak pemerintah, lembaga lingkungan, serta perwakilan perusahaan mengarah pada perlunya penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan keterbukaan informasi, dan penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas.

Bagian ini membahas secara lebih mendalam hasil temuan penelitian yang telah disajikan pada bagian sebelumnya dengan menggunakan perspektif teori Environmental Communication and the Public Sphere dari Robert Cox (2010) sebagai landasan analisis. Pembahasan ini bertujuan untuk menafsirkan makna temuan empiris dalam konteks dinamika komunikasi lingkungan di Kelurahan Buluri, serta menelusuri bagaimana proses komunikasi, partisipasi, dan pengelolaan lingkungan dijalankan oleh para pemangku kepentingan, pemerintah, perusahaan, lembaga masyarakat sipil, dan warga setempat.

Menurut Cox (2010), komunikasi lingkungan tidak hanya sekadar penyampaian informasi tentang isu ekologi, melainkan juga praktik sosial dan politik yang membentuk cara masyarakat memahami, menilai, dan bertindak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, komunikasi lingkungan menjadi arena yang menentukan sejauh mana kebijakan

lingkungan dijalankan secara demokratis dan partisipatif. Dalam konteks penelitian ini, teori Cox digunakan untuk menilai bagaimana ruang publik lingkungan di Buluri terbentuk, siapa aktor dominan di dalamnya, serta bagaimana makna pelestarian lingkungan dikonstruksikan dan dinegosiasikan di antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Secara sistematis, pembahasan ini dibagi ke dalam lima subbagian yang menguraikan aspek-aspek utama komunikasi lingkungan di wilayah penelitian, yaitu: (1) komunikasi lingkungan sebagai ruang publik; (2) partisipasi dan pemberdayaan dalam perspektif komunikasi kritis; (3) peran pemerintah dan dinamika kekuasaan komunikatif; (4) kebijakan dan penegakan regulasi lingkungan; serta (5) reklamasi dan keadilan ekologis. Setiap bagian berupaya mengaitkan data empiris lapangan dengan konsep-konsep teoretis Robert Cox untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik komunikasi lingkungan dalam konteks pertambangan MBLB di Kelurahan Buluri.

5. Simpulan

In this section authors describe the conclusion drawn from the results and discussion section. The conclusion should answer the main problem of the research. Author can also add recommendations for following studies especially with similar topics to author's research.

Berisi poin utama dalam penelitian ini yang menjawab rumusan masalah penelitian. Silahkan Anda jelaskan jawaban Anda terhadap rumusan masalah yang tertulis bagian Pendahuluan. Pada bagian ini juga bisa disebutkan mengenai rekomendasi penelelitian berikutnya yang diperoleh dari analisis topik Anda. Berikanlah rekomendasi yang yang berkaitan dengan topik Anda.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dinamika komunikasi lingkungan dalam mitigasi risiko kerusakan lingkungan akibat pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi Kota Palu, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dinamika komunikasi lingkungan dalam mitigasi risiko kerusakan lingkungan melibatkan berbagai stakeholder yang terdiri dari pemerintah daerah, perusahaan tambang, masyarakat lokal, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Interaksi komunikasi antar aktor tersebut menunjukkan adanya proses pertukaran informasi, koordinasi, serta negosiasi kepentingan dalam merespon dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Kedua, dalam dimensi fungsi pragmatis, komunikasi lingkungan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, koordinasi tindakan, serta penyelesaian persoalan praktis yang berkaitan dengan dampak pertambangan. Pemerintah daerah menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, perusahaan tambang berperan dalam pelaksanaan operasional serta tanggung jawab pengelolaan lingkungan, sementara masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasi dan pengalaman langsung terkait dampak lingkungan yang mereka rasakan. Ketiga, dalam dimensi fungsi konstitutif, komunikasi lingkungan berperan dalam membentuk pemahaman, kesadaran, serta konstruksi makna bersama mengenai pentingnya perlindungan lingkungan. Proses komunikasi antar stakeholder turut membangun kesadaran kolektif tentang risiko kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan serta mendorong terbentuknya pemahaman mengenai perlunya upaya mitigasi secara kolaboratif. Keempat, hasil pemetaan dominasi aktor menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan perusahaan tambang memiliki posisi yang relatif lebih dominan

dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan aktivitas pertambangan dan mitigasi dampak lingkungan. Sementara itu, masyarakat berada pada posisi yang lebih terbatas dalam mempengaruhi kebijakan, meskipun mereka merupakan pihak yang paling terdampak secara langsung. Akademisi dan organisasi masyarakat sipil berperan sebagai aktor yang memberikan dukungan pengetahuan, advokasi, serta penguatan kesadaran lingkungan. Kelima, dinamika komunikasi lingkungan yang terjadi menunjukkan bahwa efektivitas mitigasi risiko kerusakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antar stakeholder. Komunikasi yang terbuka, partisipatif, dan kolaboratif berpotensi memperkuat upaya mitigasi serta mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Referensi

Alexander G, & Hafied Cangara. (2018). *Komunikasi Lingkungan (Penanganan kasus-kasus lingkungan melalui strategi komunikasi)*. jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Cox, R. (2010*). Environmental Communication and the Public Sphere. (Vol. 3rd Edition)*. Los Angeles: Sage..

Ardian, H. Y. (2019). Kajian Teori Komunikasi Lingkungan Dalam Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi*.

Bajari, A. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi, prosedur, tren dan etika*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

David, H. (2025). *Dampak Galian Tambang Batuan di Kelurahan Buluri, Ulujadi yang Mengakibatkan Mata Air Terganggu dan Kasus ISPA Meningkat*. Mataharian.com. https://mataharian.com/lingkungan/dampak-galian- tambang-batuan-di kelurahan-buluri-ulujadi-yang-mengakibatkan-mata- air-terganggu-dan-kasus-ispa meningkat/

Floor. (2004). *Environmental Communication: principles, Approachles, and strategies of communication apllied to environmental managemen*. Quezone City: UP open University.

Grunig, J.E. & Repper F.C. (1992). Strategi Management, Public, and Issues. Dalam J.E. Grunig (penyunting). *Exelence in Public Relations and Communications Management*. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Iftitah, N. (2022). *Penerapan Media Pembelajaran Berbasis Audio Visual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Palopo* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo]. Repository UIN Palopo. https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/8026/

Indonesia, P. P. (2014). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang orrPemerintahan Daerah. peraturan.bpk. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014

Kasali, R. (1994). *Manajemen Publik Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Grafiti

Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja RosdaKarya.

Pezzullo, P. C., & Cox, R. (2018). *Environmental Communication and the Public Sphare*. Los Angles, California, USA: Sage.

Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

WALHI, S. (2024). *WALHI SULTENG DAN JATAM SULTENG Mendesak Pemerintah Untuk Melakukan Audit Lingkungan dan Moratorium Izin Usaha Pertambangan Pasir dan Batuan di Sepanjang Pesisir Palu- Donggala*. walhisulteng.org. https://walhisulteng.org/walhi-sulteng-dan-jatam-sulteng-mendesak-pemerintah-untuk-melakukan-audit-lingkungan-thedan-moratorium-izin-usaha-pertambangan-pasir-dan batuan-di-sepanjang- pesisir-palu-donggala/

Walser, G. (2002). Economic impact of world mining. International symposium on uranium production cycle and https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20265794 2302-2035